

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika hubungan antara Tiongkok dan Taiwan dapat dikatakan sebagai pola hubungan 'subordinasi'. Hal tersebut dikarenakan konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan Taiwan telah berlangsung lama sejak tahun 1945. Setelah Partai Komunis China mengubah sistem monarki menjadi republik dan mengambil alih negara Tiongkok, serta kemenangan kaum komunis ini dengan mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek yang beraliran nasionalis membentuk dan membuat negara sendiri dan ingin lepas dari bagian negara Tiongkok setelah kalah perang sipil menghadapi Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong (Sujadmiko, 2010, hal. 105). Kekalahan tersebut membuat Partai yang beraliran Nasionalis ini melarikan diri menuju Pulau Formosa dan mendirikan negara bernama *Republic of China*. Dampak yang ditimbulkan pasca kemenangan Partai Komunis di Tiongkok adalah perkembangan komunisme di Asia menyebar luas di negara-negara Asia timur dan Asia Tenggara (Deni Adi Wijaya, 2015, hal. 12).

Pada tahun 1955, Amerika Serikat membantu Taiwan dalam mengatasi berbagai permasalahannya dengan Tiongkok. Amerika Serikat membantu Taiwan dengan cara menyuplai peralatan militer dengan jumlah yang besar ke Taiwan untuk mengantisipasi ancaman yang diberikan oleh Tiongkok. Perdagangan senjata antara Amerika Serikat dengan Taiwan ini sudah terjalin lama, hingga pada saat persoalan status kenegaraan Taiwan dipertanyakan, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada saat upaya reunifikasi tersebut, Amerika Serikat sering muncul menjadi negara yang melindungi Taiwan (Ramadhani, 2018, hal. 2).

Status kenegaraan Taiwan masih dipertanyakan karena banyak negara yang belum mengakui Taiwan menjadi sebuah negara, karena Tiongkok selalu menggunakan prinsip '*One China Policy*' sehingga masyarakat Tiongkok masih banyak menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang masih memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara yang sudah berdiri sendiri yang tidak ingin disamakan oleh Tiongkok (Maulana, 2016, hal. 4). Adanya prinsip '*One China Policy*' atau prinsip satu China ini yang menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok (Albert, 2016). Pemerintah Tiongkok menggunakan prinsip ini untuk setiap persoalan luar negeri yang melibatkan Taiwan. Pemerintah Tiongkok menyebutkan bahwa sebagian negara di dunia mengakui dan menerima prinsip satu China dan mengakui kedaulatan *People's Republic of China* (PRC) atas wilayah Taiwan serta menyatakan PRC merupakan pemerintah Tiongkok yang Sah (Mahadeli, 2014, hal. 3).

Adanya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok yang sudah berjalan lama tersebut membuat Tiongkok bersikap keras (Darmawan, 2015, hal. 9). Pada tahun 2013 setelah Xi Jinping diangkat menjadi Presiden dan berkuasa, Xi Jinping tentunya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya (Santi, 2013). Menanggapi persoalan hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan, Xi mengeluarkan sanksi keras terhadap Amerika Serikat, terutama pada saat adanya rencana Amerika Serikat untuk menjual peralatan militer kepada pemerintah Taiwan, penjualan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap kapabilitas pertahanan Taiwan untuk memperkuat keamanan udara dan laut (Bush R. , 2016, hal. 3). Amerika Serikat juga melakukan pembicaraan langsung dengan Tsai Ing-wen yang merupakan Presiden Taiwan. Hal tersebut membuat Xi kerap melontarkan kritik yang keras terhadap Amerika. Xi mempertegas adanya *One China Policy* yang harus dihargai dan dihormati (Dessthanian, 2016).

Sanksi keras yang diberikan oleh Xi Jinping tersebut merupakan salah satu cara upaya Xi Jinping untuk menggagalkan Taiwan untuk dapat memerdekakan diri dari Tiongkok. Xi Jinping tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk meredam keinginan Taiwan (Suastha, 2017). Militer di Tiongkok merupakan salah satu bagian yang penting dalam strategi nasional, karena dapat menjaga kedaulatan nasional, integrasi teritorial, dan mencegah adanya perlawanan dari musuh yang mengganggu kepentingan nasional (Yuliantoro, 2009, hal. 2). Militer termasuk dalam Strategi Keamanan Tiongkok, yang di mana pada tahun 2015 Tiongkok mengeluarkan Buku Putih yang berisikan tentang strategi militer Tiongkok (Timothy R. Heath, 2016, hal. 9)

Selain militer, Tiongkok juga menekankan dalam bidang ekonomi dan politik untuk tetap menjadikan Taiwan bagian dari Tiongkok. Walaupun pada hubungan ekonomi Tiongkok dan Taiwan menjadi mitra yang baik. Namun hubungan ekonomi tersebut memicu adanya konflik politik di antara Tiongkok dan Taiwan. Karena, adanya hubungan ekonomi tersebut tidak mengurangi ketegangan dalam konflik Tiongkok dengan Taiwan. Permasalahan utama dalam memicu konflik Tiongkok dan Taiwan yaitu adanya masalah politik, yang menyangkut dalam permasalahan identitas dan kedaulatan. Kebangkitan Tiongkok tidak hanya mencakup kemampuan militernya tetapi juga pada kekuatan ekonomi dan politik. Sehingga, tidak hanya militer yang menjadi fokus Xi Jinping dalam bidang keamanan namun juga pada ekonomi dan politik (Kuntic, 2015, hal. 245).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini menekankan pada strategi keamanan Tiongkok pada pemerintahan Xi Jinping dalam menggagalkan upaya Taiwan untuk merdeka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas tentang: **Bagaimana Strategi Keamanan Tiongkok terhadap Taiwan pada masa Xi Jinping ?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan Tiongkok dan Taiwan pada masa Xi Jinping.
2. Untuk mengetahui ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok.
3. Untuk mengetahui strategi keamanan Tiongkok pada Taiwan dalam mengatasi ancaman.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Skripsi ini penting untuk dilakukan karena konflik Tiongkok dan Taiwan masih terjadi, Sehingga Xi Jinping mempunyai sikap dan kebijakan yang tegas terhadap Taiwan. Walaupun Xi Jinping hanya meneruskan Kebijakan yang telah dibuat oleh Hu Jintao untuk Taiwan namun belum banyak pembahasan tentang bagaimana strategi militer Xi Jinping terhadap Taiwan, yang dalam pemerintahan Xi Jinping ini lebih menekankan pada pencegahan kemerdekaan di Taiwan dengan berbagai tindakan militer sebagai salah satu strategi dalam strategi keamanan Tiongkok. Sudah banyak pembahasan yang membahas strategi atau upaya Tiongkok dalam menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok namun tidak menjelaskan dengan strategi keamanan yang memfokuskan pada militer, politik dan ekonomi. Ada pula yang menjelaskan tentang Hubungan politik Taiwan - Tiongkok pasca terpilihnya presiden baru Taiwan, yang di mana pada penelitian tersebut

lebih menjelaskan ke arah politik kepemimpinan presiden Taiwan dan bagaimana reaksi Tiongkok atas kemenangan Presiden Taiwan (Hidriyah, 2016, hal. 6).

Terdapat penelitian tentang kebijakan luar negeri Tiongkok dengan Taiwan, namun penelitian tersebut lebih menjelaskan kebijakan keamanan pada kepemimpinan Hu Jintao. Hal yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian ini akan lebih menekankan analisis Strategi Keamanan Tiongkok untuk Taiwan dalam bidang militer, politik dan ekonomi.

## **1.5 Cakupan Penelitian**

Dalam skripsi ini, akan membahas hubungan antara Tiongkok dan Taiwan dengan adanya Strategi Keamanan Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. Penelitian ini akan membahas pada pemerintahan Xi Jinping karena Xi Jinping merupakan Presiden yang menjabat di Tiongkok sekarang. Pembahasan penelitian dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Karena, pada tahun 2013 setelah Xi Jinping diangkat menjadi Presiden dan berkuasa, Xi Jinping tentunya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda (Santi, 2013). Penelitian ini hingga tahun 2017, dikarenakan Xi Jinping masih menjabat sebagai presiden di Taiwan hingga sekarang, sehingga tahun 2017 untuk pembatas penelitian.

Namun untuk kebijakan Tiongkok untuk Taiwan, Xi Jinping masih menjalankan kebijakan yang diberikan oleh Hu Jintao untuk Taiwan dalam mengupayakan Taiwan untuk tetap menjadi bagian dari Tiongkok, dan menekankan kembali prinsip *One China Policy* dengan lebih memprioritaskan pencegahan kemerdekaan pada Taiwan. Xi Jinping menekankan kembali prinsip *One China Policy* saat mengetahui bahwa terdapat hubungan antara Amerika Serikat dengan Taiwan, adanya undang-undang yang menyatakan bahwa Amerika Serikat harus membantu Taiwan untuk dapat mempertahankan diri. Yang mana,

Amerika Serikat membantu Taiwan dengan cara menjual senjata ke Taiwan. Hal ini tentunya mendapat reaksi keras dari Xi Jinping, karena adanya hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan ini dapat mengancam keamanan Tiongkok (BBC, 2017).

Tidak hanya itu, Taiwan yang sekarang dipimpin oleh Tsai Ing-Wen bersikeras untuk memerdekakan diri, yang membuat Xi Jinping tidak segan untuk menggunakan militer. Oleh karena itu, Dalam skripsi ini akan membahas mengenai dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan, lalu menjelaskan ancaman apabila Taiwan lepas dari Tiongkok, kemudian membahas strategi keamanan Tiongkok untuk menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Dilema hubungan Tiongkok dengan Taiwan**

**Pertama**, terkait hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan, di mana terdapat suatu pandangan dari jurnal yang berjudul *‘China-Taiwan Relations and Implications For Security of Southeast Asia’* yang telah ditulis oleh Luo Qi. Penulis berpendapat terkait hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan dari beberapa sudut pandang. Dalam jurnal ini menjelaskan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan melalui dalam tiga tahapan yang berbeda: pertama, konfrontasi militer dari tahun 1949-1978: kedua, adanya hubungan ekonomi, politik dan kebudayaan dari tahun 1979-1994: ketiga, interaksi ekonomi dan hubungan politik dari tahun 1995-sekarang.

Dari ketiga tahapan di atas, penulis menjelaskan tentang adanya kurangnya interaksi antara Tiongkok dan Taiwan, apabila hubungan Tiongkok dan Taiwan mempunyai hubungan yang baik maka akan terjadi peningkatan kerja sama ekonomi antar kedua negara. Sebaliknya, apabila konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan berkelanjutan akan memberi pengaruh kepada stabilitas Asia Timur dan Asia

Tenggara, terutama kepada negara-negara ASEAN yang memiliki konflik antara ke dua negara tersebut (Qi, 2000, hal. 182-183).

**Kedua**, terkait hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan, di mana terdapat suatu pandangan dari jurnal yang berjudul *‘Conflict of Rules Between China and Taiwan and Their Significance’* yang ditulis oleh Chi Chung. Penulis menjelaskan dan memberikan sketsa aturan hukum yang ada antara konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan, dan menggambarkan pentingnya kedaulatan dari dua perspektif latar belakang sosial dan hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa argumen bahwa Tiongkok dan Taiwan harus memiliki aturan hukum terlepas dari perselisihan kedaulatan kedua negara tersebut (Chung, 2008, hal. 580-581).

**Ketiga**, terkait hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan, di mana terdapat suatu pandangan dari jurnal yang berjudul *‘The Future of China-Taiwan Relations’* yang ditulis oleh Megan Nealis dan Andrew Webster. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang menganalisis dan mengevaluasi apakah Tiongkok dan Taiwan akan memungkinkan untuk reunifikasi, adanya konfrontasi militer atau adanya pemeliharaan status quo. Selain itu, jurnal tersebut juga menjelaskan tentang posisi RRC dalam ‘satu Tiongkok, dua sistem’ yang akan mengarah pada reunifikasi damai. Namun terdapat faktor-faktor yang dalam reunifikasi tersebut seperti adanya masalah persepsi dan kebijakan Amerika Serikat mengenai konflik lintas-selat. Penulis juga menjelaskan tentang adanya berbagai perdebatan mengenai masa depan lintas-selat dengan adanya perspektif regional dan teoritis (Webster, 2007, hal. 83-84).

### **1.6.2 Strategi Keamanan Tiongkok**

**Pertama**, terkait Strategi keamanan Tiongkok, di mana terdapat suatu pandangan dari artikel yang berjudul *'The Taiwan Issue: Does China Have a Strategy?'* yang ditulis oleh Lijun Sheng. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Tiongkok sedang memfokuskan kembali strategi luar negerinya di kawasan Asia Pasifik. Artikel tersebut membahas tentang adanya strategi baru yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam strategi keamanan yaitu strategi militer, strategi pengembangan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi keamanan telah berubah lebih berorientasi regional (Sheng, 2010, hal. 124-125).

**Kedua**, terkait Strategi Militer Tiongkok, di mana terdapat suatu pandangan jurnal yang berjudul *'Understanding China's Military Strategy'* yang ditulis oleh Rajeswari Pillai Rajagopalan. Dalam jurnal tersebut menjelaskan modernisasi militer Tiongkok dalam upaya untuk meningkatkan strategi militer Tiongkok yang telah berevolusi dari masa *Mao's People's war* menjadi modernisasi militer yang memiliki teknologi modern saat ini. Dalam jurnal ini juga menjelaskan konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang mana militer Tiongkok yang berusaha untuk mengalahkan Amerika Serikat apabila mendukung Taiwan di konflik Tiongkok dengan Taiwan (Rajagopalan, 2008, hal. 1014-1015).

**Ketiga**, terkait Strategi Politik Tiongkok, di mana terdapat jurnal yang berjudul *'Beijing's New Strategies toward a Changing Taiwan'* yang ditulis oleh Gang Lin. Dalam jurnal tersebut menjelaskan China memiliki strategi politik untuk terlibat dengan partai KMT yang berkuasa di Taiwan untuk mencapai reunifikasi.

Keterlibatan China membuat KMT menerima *One China Policy*, sementara itu partai DPP di Taiwan tetap memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. Pada resolusi tahun 1999, tentang masa depan Taiwan DPP berusaha keras memperjuangkan kemerdekaan Taiwan dan menegaskan bahwa ROC adalah negara berdaulat yang terpisah dari RRC.

Pada tahun 2008 KMT kembali berkuasa di Taiwan, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh China semakin besar dengan adanya penerimaan Konsensus 1992 pada pemerintahan Ma. China lebih memilih KMT daripada DPP terutama pada pemilihan umum, karena China berusaha keras mempengaruhi hasil pemilihan Taiwan sejak tahun 1996. China berusaha meyakinkan masyarakat Taiwan, bahwa apabila DPP berkuasa maka hubungan China dan Taiwan merenggang karena tidak mengakui adanya konsensus 1992 (Lin, 2016, hal. 8-9).

**Keempat**, terkait strategi Ekonomi Tiongkok, di mana terdapat jurnal yang berjudul '*Chinese Economic Coercion Against Taiwan: A Tricky Weapon to Use*' yang ditulis oleh Murray Scot Tanner, dalam jurnal tersebut terdapat pendapat bahwa China dapat mengeksploitasi hubungan ekonomi yang sedang berkembang dengan Taiwan, untuk dapat membawa tekanan ekonomi dan politik di Taiwan dengan berbagai cara, yaitu dengan mendorong Taiwan untuk terlibat dalam negosiasi reunifikasi, menekan orang-orang yang berpengaruh secara politis di Taiwan, baik elit ekonomi maupun politik untuk dapat menciptakan hubungan ekonomi yang penting untuk kepentingan China.

Tujuan China melakukan hal tersebut karena ingin memperluas hubungan ekonomi dengan Taiwan dan juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi China serta dapat mendorong reunifikasi damai. Bertahun-tahun China telah menekan dan

secara terbuka menunjukkan strategi menggunakan rakyat untuk menekan para pejabat dan menggunakan pengusaha untuk menekan politik (Tanner, 2007, hal. 3-4).

Dari beberapa jurnal di atas telah menjelaskan banyak hal tentang konflik yang terjadi pada Tiongkok dan Taiwan, ada pula yang membahas mengenai kebijakan atau strategi dalam keamanan terkait militer, politik dan ekonomi dalam konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan. Yang membedakan skripsi ini dengan yang lain adalah menekankan pada kebijakan atau strategi keamanan Tiongkok untuk mempertahankan Taiwan agar tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Hal yang baru dalam skripsi ini adalah membahas ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok dan kebijakan keamanan Tiongkok untuk mengatasi adanya ancaman tersebut yang ditekankan pada *Security Concept* yang di kemukakan oleh Barry Buzan.

## **1.7 Perspektif (Teori/Konsep)**

### *Security Concept*

Di dalam skripsi ini akan membahas mengenai konsep sektor dalam Keamanan menurut Barry Buzan. Keamanan dapat dikatakan stabilisasi hubungan konflik atau adanya ancaman. Keamanan dalam hubungan internasional dapat dikatakan adanya hubungan yang berkonflik namun terdapat suatu tindakan untuk mencegah hal tersebut (Barry Buzan, 1998, hal. 4). Ancaman dapat muncul dari banyak bidang yang berbeda, militer dan non militer (Barry Buzan, 1998, hal. 5).

Dalam buku *Security: A New Framework for Analysis*, Buzan menjelaskan bahwa keamanan dikategorikan dalam lima sektor yaitu: *Pertama, Military Sector*, mencakup dua

tingkat dalam pengelolaan kapabilitas persenjataan negara, yaitu secara ofensif maupun secara defensif. *Kedua, Political Sector*, mencakup stabilitas organisasi negara, sistem ideologi atau sistem pemerintahan. *Ketiga, Economic Sector*, mencakup pada sumber daya manusia, keuangan, atau pasar yang dapat mempertahankan kesejahteraan sebuah negara. *Keempat, Societal Sector*, mencakup untuk mempertahankan pola tradisional seperti bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan identitas nasional. *Kelima, Environmental Sector*, mencakup dalam memelihara lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia (Barry Buzan, 1998, hal. 22-23).

Dalam keamanan, negara merupakan suatu pertahanan. Ketika terdapat suatu isu sebagai ancaman terhadap suatu objek (negara, pemerintah, wilayah, dan masyarakat) yang mengancam keamanan dapat menggunakan suatu tindakan untuk menanganinya. Dengan adanya ancaman dalam keamanan, maka negara dapat menggunakan kekuatannya untuk menangani ancaman tersebut agar tidak semakin berkembang. Sesuai dengan pernyataan dalam Buku Barry Buzan, yaitu:

*The special nature of security threats justifies the use of extraordinary measures to handle them. The invocation of security has been the key to legitimizing the use of force, but more generally it has opened the way for the state to mobilize, or to take special powers, to handle/existential threats. Traditionally, by saying "security," a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development* (Barry Buzan, 1998, hal. 21).

Penggunaan konsep sektor dalam keamanan ini dirasa dapat digunakan untuk penelitian, karena Tiongkok dan Taiwan mempunyai permasalahan dalam bidang keamanan, sehingga konsep sektor dalam keamanan Barry Buzan dapat mengidentifikasi ancaman yang muncul dari keamanan. Tiongkok merasa akan adanya ancaman apabila Taiwan tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Tiongkok. Oleh karena itu Tiongkok berusaha untuk Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya dan mempunyai alasan yang kuat dalam

mempertahankan Taiwan. Apabila Taiwan dapat lepas dari Tiongkok maka berdampak bagi keamanan Tiongkok. Dalam Skripsi ini hanya menekankan pada *Military Sector, Political Sector dan Economic Sector*. Bukan berarti dalam permasalahan hubungan di Tiongkok dan Taiwan tidak ada permasalahan dalam hal *Societal Sector* dan *Environmental Sector*. Sehingga, dalam skripsi ini membahas mengenai strategi keamanan yang dikeluarkan oleh Xi Jinping untuk tetap menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya yang berfokus pada *Military Sector, Political Sector dan Economic Sector*.

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah proses kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam sebuah penelitian terdapat suatu keinginan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, sehingga mencari jawaban dalam sebuah masalah.

### **1.8.1 Metode kualitatif**

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah berawal dari masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Sistematika penelitian kualitatif pada latar belakang menggambarkan fenomena-fenomena yang memunculkan sebuah masalah, pada bagian ini diuraikan situasi dan kondisi sehingga menarik perhatian peneliti dan pembaca, serta pada latar belakang mengemukakan hal-hal yang ingin diketahui dan mengemukakan hal yang akan diteliti.

Setelah menguraikan latar belakang terdapat mengidentifikasi masalah, setelah itu terdapat pembatasan masalah, membatasi masalah yang akan diteliti itu penting karena penelitian menjadi jelas dan terarah. Kemudian, merumuskan masalah yang terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, setelah itu menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Dan pada bagian akhir, penulis akan mengambil sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada deskripsi dan interpretasi dan mengarah pada pengembangan konsep atau teori (Beverley Hancock, 2009, hal. 6).

Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data terkait hal-hal yang melatarbelakangi hubungan dan kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan pada pemerintahan Xi Jinping dan juga materi-materi lainnya dapat mendukung penulisan penelitian ini.

### **1.8.2 Teknik Pengambilan Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan pengambilan data sekunder. Yang di mana data sekunder digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Selain itu, data sekunder juga membantu dalam memberikan masukan suatu solusi yang mendukung dalam penyelesaian permasalahan yang akan diteliti. Dalam pengambilan data sekunder terdapat tiga cara, yaitu: pertama, melakukan pencarian secara manual, dengan cara ini dapat mencari data pendukung ke tempat seperti perpustakaan.

Kedua, melakukan pencarian dengan cara online, yang di mana adanya internet maka mempermudah dalam mencari data pendukung. Yang ketiga, pengumpulan data melalui pencarian secara manual dan online. Dalam pengambilan data secara sekunder ini juga melakukan pengamatan, perbandingan serta mengambil

sumber data yang terdapat di buku, jurnal atau artikel yang berada di internet atau perpustakaan (Martono, 2010 ).